

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN**

NOTA DINAS
NOMOR 597/BRPI/TU.140/VII/2026

Yth. : Sekretaris BPPSDM KP
Dari : Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 16 Juli 2026

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) sebagai salah satu bahan evaluasi dan penilaian kinerja BRPI atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Agus Cahyadi

Tembusan :
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU
UNTUK
INDONESIA EMAS



LAPORAN KINERJA TW II Tahun Anggaran 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



TIM PENYUSUN

Penanggungjawab : Agus Cahyadi, S.Pi., M.Si.
Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan

Ketua : Sunarso, S.Sos.
Kepala Subbag Umum

Anggota : Inna Nurbayanti Herdiana, A.Md

KONTRIBUTOR

1. Ahmad Ali Akbar, S.Pi
2. Maya Nurnaningsih, S.M
3. Nur Fansuri, A.Md
4. Deny Puji Utami, A.Md
5. Dwi Cahya Kusuma, S.Si
6. Mimin Fatimah, S.Pi
7. Indah Rahmawati, S.Pi





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya-Nya sehingga penyusunan **Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Pemuliaan Ikan Triwulan II Tahun 2026** dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan serta dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja triwulan selanjutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Sukamandi, 16 Juli 2026
Kepala Balai,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Agus Cahyadi, S.Pi., M.Si.





DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUJUAN	3
1.3. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA	7
1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	10
1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN	11
II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. RENCANA STRATEGIS	15
A. VISI	15
B. MISI	16
C. TUJUAN	17
2.2. SASARAN KEGIATAN	18
2.3. RENCANA KERJA TAHUN 2026	20
2.4. PERJANJIAN KINERJA 2026	22
2.5. PENGUKURAN KINERJA	24
III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. PRESTASI KINERJA	25
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	26
3.2.1. SASARAN KEGIATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN ..	27
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	41
IV. PENUTUP	45
4.1. KESIMPULAN.....	45
4.2. PERMASALAHAN, REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT	46
4.3. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI TRIWULAN I TAHUN 2026	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard Capaian Kinerja BRPI Triwulan II Tahun 2026	viii
Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI)	5
Gambar 3. Sebaran Pegawai BRPI Tahun 2026	8
Gambar 4. Keragaan ASN BRPI Tahun 2026	8
Gambar 5. Sebaran Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2026	9
Gambar 6. Sebaran Pegawai BRPI Berdasarkan Gender	9
Gambar 7. Dashboard Capaian Kinerja BRPI Triwulan II Tahun 2026.....	25
Gambar 8. Report Capaian Kinerja BRPI Triwulan II Tahun 2026	45





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja BRPI Triwulan II Tahun 2026.....	viii
Tabel 2. Keterkaitan Visi, Misi, dan Tujuan dalam Renstra BRPI 2025-2029	17
Tabel 3. Rancangan Indikator dan Target Kinerja BRPI Tahun 2025-2029	20
Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan BRPI 2026	21
Tabel 5. Rencana Anggaran Kegiatan BRPI Tahun 2026	22
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BRPI 2026	22
Tabel 7. Capaian Kinerja BRPI Triwulan II Tahun 2026	26
Tabel 8. Capaian IKK 1 BRPI Triwulan II Tahun 2026	28
Tabel 9. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan UPT Lingkup Sekretariat BPPSDM TW II Tahun 2026	29
Tabel 10. Capaian IKK 2 BRPI Triwulan II Tahun 2026	30
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT Lingkup Sekretariat BPPSDM TW II Tahun 2026	31
Tabel 12. Capaian IKK 5 BRPI Triwulan II Tahun 2026	34
Tabel 13. Capaian Indikator Profesionalitas ASN UPT Lingkup Sekretariat BPPSDM TW II Tahun 2026	35
Tabel 14. Capaian IKK 7 BRPI Triwulan II Tahun 2026	37
Tabel 15. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP UPT Lingkup Sekretariat BPPSDM TW II Tahun 2026	38
Tabel 16. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja sampai Bulan Juni TA 2026	42
Tabel 17. Kronologi Revisi Anggaran BRPI Triwulan II Tahun 2026	42
Tabel 18. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2026	43
Tabel 19. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2026	43
Tabel 20. Permasalahan, Rekomendasi, dan Tindaklanjut TW II Tahun 2026	46
Tabel 21. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026	47

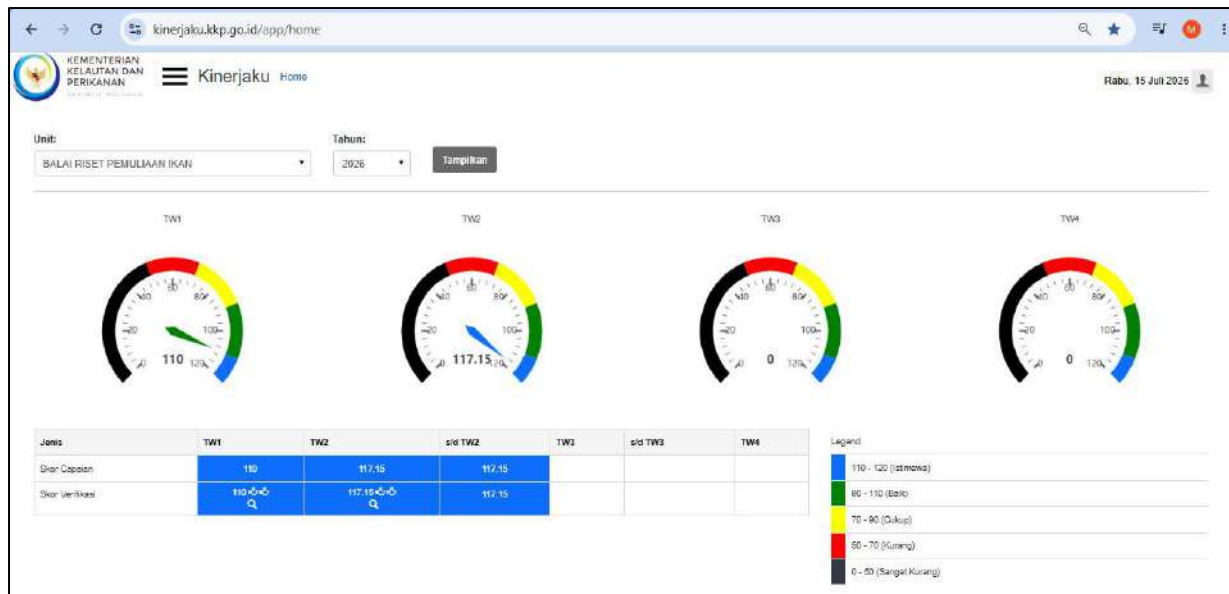


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja triwulan II tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, khususnya untuk triwulan selanjutnya.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan selama triwulan II tahun 2026. Pada tahun 2026, BRPI mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan yaitu **“Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dimana terdapat 1 IKK yang mendukung kinerja level 1 BPPSDMKP, yakni IKK Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai). Penetapan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BRPI ini tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 antara Kepala BRPI dengan Sekretaris BPPSDM KP.

Pengukuran capaian kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan menggunakan aplikasi **Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja** (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis pada aplikasi kinerjaku tampak bahwa pada triwulan II Tahun Anggaran 2026, BRPI berhasil mencapai target kinerja dengan status istimewa (warna biru) dengan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan adalah sebesar **117,15%** sebagaimana tersaji dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Dashboard Capaian Kinerja BRPI Triwulan II Tahun 2026

Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2026 (www.kinerjaku.kkp.go.id)

Sampai dengan triwulan II tahun 2026 telah dilakukan pengukuran pada 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran ke-empat Indikator Kinerja, capaian kinerja BRPI pada triwulan II bernilai sangat baik dengan nilai capaian sesuai dan/ atau melebihi target yang telah ditetapkan pada triwulan II tahun 2026. Capaian Kinerja BRPI triwulan II tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja BRPI Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2026	TARGET TRIWULAN II 2026	REALISASI TRIWULAN II 2026	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	86,00	86,00	100,00	116,28
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	92,10	83,00	99,08	119,37
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	81,00	-	-	-
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)	71,75	-	-	-
		5.	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	83,10	76,00	85,84	112,95
		6.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)	71,00	-	-	-
		7.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	77,00	77,00	100,00	120,00



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET TRIWULAN II 2026	REALISASI TRIWULAN II 2026	%
		8. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	2,00	-	-	-
		9. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	90,00	-	-	-
		10. Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks)	2,98	-	-	-

Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2026 (www.kinerjaku.kkp.go.id)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja yang memiliki persentase nilai capaiannya melebihi 100% yaitu IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI dengan capaian 116,28%, IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI dengan perolehan capaian 119,37%, IKK Indeks Profesionalitas ASN BRPI dengan capaian 112,95%, dan IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI dengan capaian. Secara umum nilai capaian kinerja BRPI pada triwulan II tahun 2026 masuk kategori sangat baik (istimewa).

Secara akuntabilitas keuangan, pagu anggaran BRPI TA 2026 setelah adanya revisi BA BUN yakni menjadi Rp7.711.854.000,- dan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp3.901.552.445,- atau setara dengan 50,59% berdasarkan aplikasi MyIntress per tanggal 30 Juni 2026 untuk mencapai target-target kesembilan Indikator Kinerja.

Namun demikian guna mewujudkan kinerja yang optimal serta dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan upaya perbaikan kedepan diantaranya :

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap indikator kinerja dengan target tahunan untuk memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Melakukan verifikasi dan validasi secara berkala untuk memastikan agar capaian kinerja yang didapat sesuai dengan data dukung yang ada; serta
3. Pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

Laporan Kinerja triwulan II tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban secara tertulis sekaligus menjadi bahan pertimbangan pimpinan





dalam memberikan arahan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya. Sehingga diharapkan dapat terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).





I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan komersialisasi perikanan budidaya secara berkelanjutan maka perikanan budidaya di Indonesia membutuhkan teknologi inovatif dari hulu hingga hilir sehingga terjadi peningkatan efisiensi dalam suatu usaha atau industri perikanan budidaya. Inovasi teknologi yang efektif dan efisien, berdaya saing tinggi serta berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Teknologi yang inovatif ini perlu didiseminasikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat untuk segera diaplikasikan dalam usaha yang *riil* sebagai upaya peningkatan efisiensinya. Salah satu inovasi yang perlu disediakan adalah ketersediaan varietas unggul ikan budidaya. Disamping itu, beberapa aspek yang diharapkan dukungannya adalah infrastruktur, permodalan dan kelembagaan yang efektif.

Penyediaan varietas ikan unggul dapat ditempuh dengan perbaikan kualitas genetik varietas ikan yakni dengan program pemuliaan yang meliputi program seleksi (*selective breeding*), persilangan (hibridisasi), dan rekayasa genetika. Penerapan teknik rekayasa genetika ikan di BRPI sejak tahun 2009 telah menunjukkan kemajuan sehingga dapat terus dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan program pemuliaan ikan.

Prospek pengembangan perikanan budidaya sebagai unit usaha sangat terbuka lebar mengingat melimpahnya sumber daya ikan yang dapat dijadikan sebagai bahan atau modal awal usaha tersebut. Secara garis besar komoditas-komoditas perikanan budidaya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Komoditas ekspor yang berdaya saing dengan ciri mempunyai pasar internasional, sumberdaya melimpah, sumber devisa, teknologi dikuasai, dan bersifat industri. Komoditas yang tergolong dalam kategori ini diantaranya adalah tuna, udang windu, udang vaname, rumput laut, lobster laut, kepiting, rajungan, bandeng, ikan kerapu, kerang abalon, ikan nila dan ikan hias;
2. Komoditas ketahanan pangan dengan ciri mempunyai pasar domestik, sumberdaya cukup tersedia, mudah dipelihara secara massal, biaya produksi murah, dan



teknologi budidaya mudah diadopsi. Komoditas yang termasuk dalam kategori ini adalah ikan lele, ikan mas, ikan patin dan udang galah; dan

3. Komoditas prospektif yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Komoditas yang masuk dalam kategori ini adalah Ikan Gurami, Ikan Sidat, ikan spesifik lokal dan ikan hias air tawar.

Dari prospek yang ditawarkan oleh Sektor Perikanan Budidaya tersebut, dibentuklah Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Eselon III Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset pemuliaan ikan budidaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BRPI berlokasi di Jalan Raya 2 Pantura Sukamandi, Patokbeusi, Subang, Jawa Barat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BRPI sebagai salah satu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja mempunyai kewajiban untuk :

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; dan
2. Menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Organisasi (Eselon I).

Laporan Kinerja BRPI dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerjanya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) adalah :

1. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Perpres 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDM.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan adalah:

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Pemuliaan Ikan menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat;
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Riset Pemuliaan Ikan; serta
3. Sebagai umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset pemuliaan ikan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang



mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset pemuliaan ikan budidaya. Dalam melaksanakan tugas ini, BRPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
2. Melaksanakan riset pemuliaan ikan budidaya yang meliputi perbenihan, genetika, biologi, reproduksi, fisiologi dan bioteknologi untuk menghasilkan ikan unggul;
3. Melaksanakan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerja sama riset;
4. Melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
5. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Riset Pemuliaan Ikan.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, BRPI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

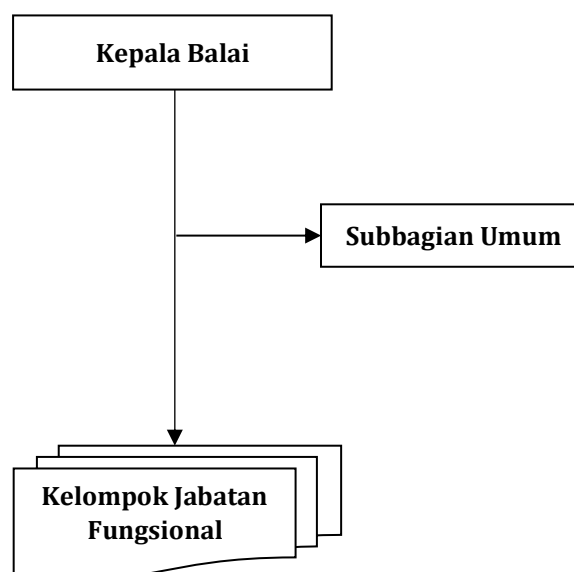
1. Menyenggarakan riset pemuliaan ikan dalam bentuk perakitan strain dan penyusunan paket teknologi dalam rangka menghasilkan varietas ikan unggul untuk mendukung inovasi teknologi perikanan budidaya yang produktif, efisien dan berkelanjutan;
2. Menyenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring pemuliaan ikan, pengelolaan jaringan informasi dan penyebaran hasil-hasil riset melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi serta media cetak, elektronik dan internet;
3. Menyenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor serta sarana dan prasarana riset serta operasionalisasi kantor;
4. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan riset yang meliputi penyusunan program dan anggaran, pelayanan teknis, ketatausahaan serta monitoring dan evaluasi;
5. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas serta profesionalisme; dan
6. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya riset melalui penggalangan kerjasama dalam rangka terselenggaranya suasana kerja yang kondusif dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.



Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang pada pasal 290 bahwasannya Susunan Organisasi BPPSDM level Eselon II terdiri dari Sekretariat BPPSDMKP, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam masa transisi organisasi level Unit Pelaksana Teknis (UPT), BRPI melaksanakan fungsi koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDMKP. Dalam surat keputusan Kepala BPPSDMKP tersebut menetapkan bahwa Sekretariat BPPSDMKP melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan manajerial (meliputi perencanaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, hukum, organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan) terhadap 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) salah satunya Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan, BRPI dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Struktur sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI)



Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi ketua dan/atau anggota Tim Kerja pada Balai Riset Pemuliaan Ikan sesuai dengan Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan nomor B.14/BRPI/KP.440/I/2026 tanggal 6 Januari 2026. Susunan keanggotaan Tim Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan hasil perhitungan analisis beban kerja pegawai. Susunan Tim kerja BRPI hanya terdiri dari 1 tim kerja, yaitu Dukungan Manajerial. Adapun uraian fungsi Tim Kerja Dukungan Manajerial Balai Riset Pemuliaan Ikan antara lain:

- a) Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen usulan kegiatan dan anggaran, penyusunan Manajemen Resiko (MR), pengelolaan belanja pegawai, perencanaan kebutuhan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan, realisasi keuangan, laporan perbendaharaan dan akuntansi, penyampaian SPT, laporan keuangan, system pengendalian internal pemerintah (SPIP), penyiapan dokumen keperluan pengawasan aparat fungsional (internal dan Eksternal/ Itjen KKP dan BPK) dan tindak lanjutnya, penataan dokumen keuangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- b) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang meliputi 8 komponen indikator serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- c) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program, kebijakan, kegiatan, dan anggaran kelautan dan perikanan, Pendampingan perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaporan kegiatan, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, capaian kinerja serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- d) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran kinerja anggaran serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- e) Koordinasi dan pelaksanaan penyiapan dokumen keperluan Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN), Penilaian Kinerja pegawai (target, realisasi, bukti dukung, penilaian perilaku dan pencetakan), perubahan status administrasi kepegawaian (KP, KGB, Mutasi, Pensiun, Penghargaan, sumpah PNS, Ijin Belajar, Tugas Belajar, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah, peningkatan kapasitas pegawai

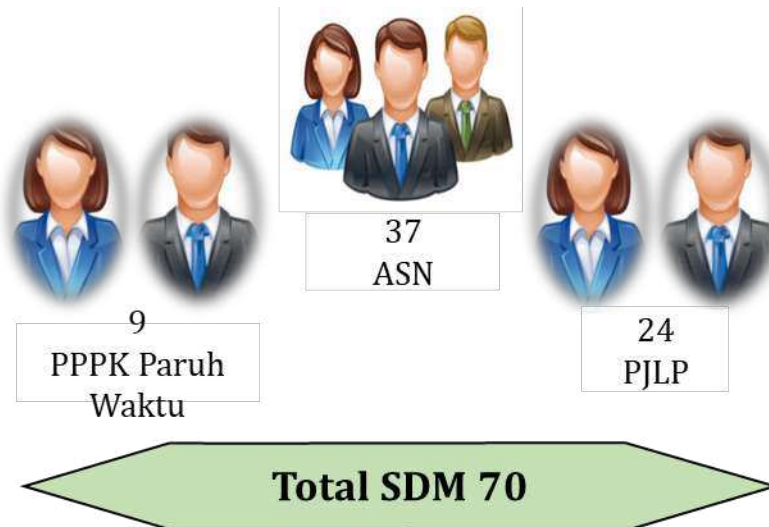


(Diklat), Keikutsertaan Seminar, Workshop dan Bimtek, Uji Kompetensi ASN, Data Simpeg, perkawinan dan perceraian), pakta integritas, rekapitulasi dan evaluasi kedisiplinan pegawai, dokumen peta jabatan dan analisis beban kerja, daftar pemangku, nama jabatan dan kelas jabatan dalam rangka penataan pegawai, LHKPN, benturan kepentingan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- f) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal, meliputi penataan arsip dinamis dan statis, penyusunan dan penerapan klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip (JRA), serta sistem pengelolaan arsip berbasis elektronik.
- g) Koordinasi dan pelaksanaan identifikasi dan tagging belanja pengadaan dan non pengadaan pada aplikasi SIRUP, melakukan input data dan mengumumkan belanja pengadaan pada aplikasi SIRUP berdasarkan pagu awal RKA-KL, pemutakhiran data RUP secara berkala, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- h) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan kemitraan dengan pihak yang melaksanakan kerjasama dengan BRPI serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- i) Koordinasi, persiapan, dan pelaksanaan layanan publik terhadap masyarakat yang handal, transparan dan akuntabel, melaksanakan penerapan LKE SAQ (*Self Assessment Questioner*) keterbukaan informasi publik BRPI, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

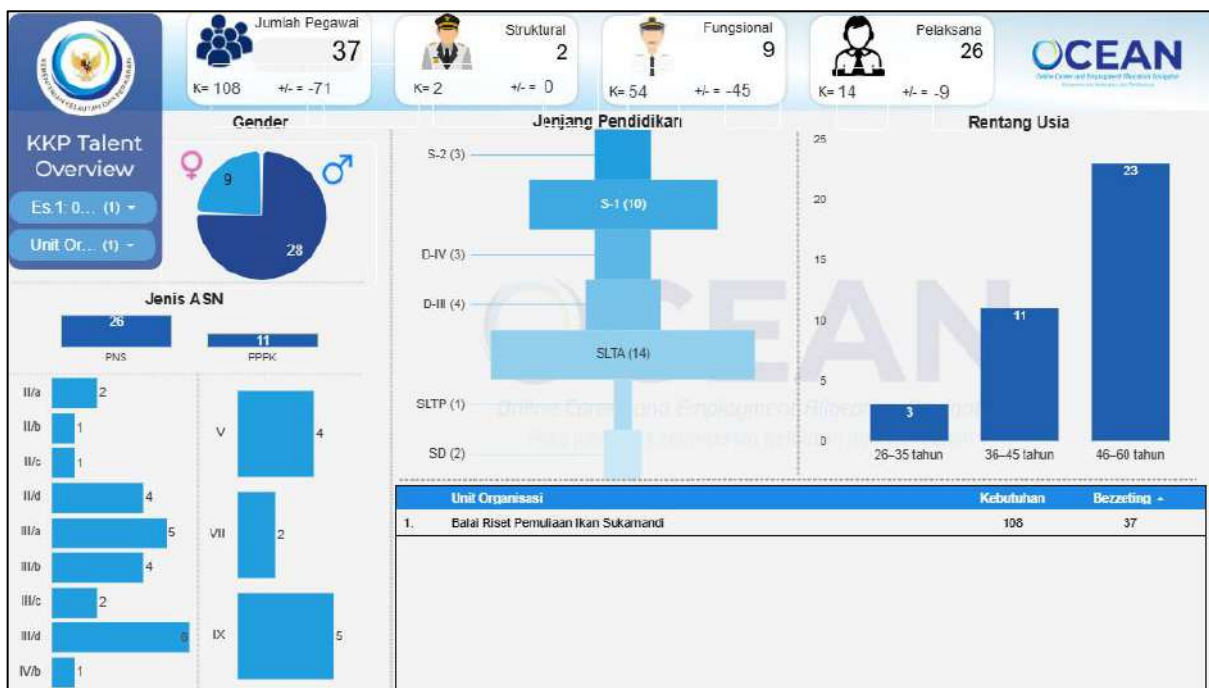
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Penggerak utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran BRPI adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas yang andal. Pegawai Balai Riset Pemuliaan Ikan pada awal tahun 2026 berjumlah 71 orang dan terdapat 1 pegawai PNS mutasi ke Biro Keuangan per 1 April 2026 sehingga jumlah pegawai sampai dengan TW II menjadi 70 orang yang terdiri atas 26 orang PNS, 11 orang PPPK, 9 orang PPPK Paruh Waktu, dan 24 orang PJLP. Berikut rincian sebaran pegawai BRPI :



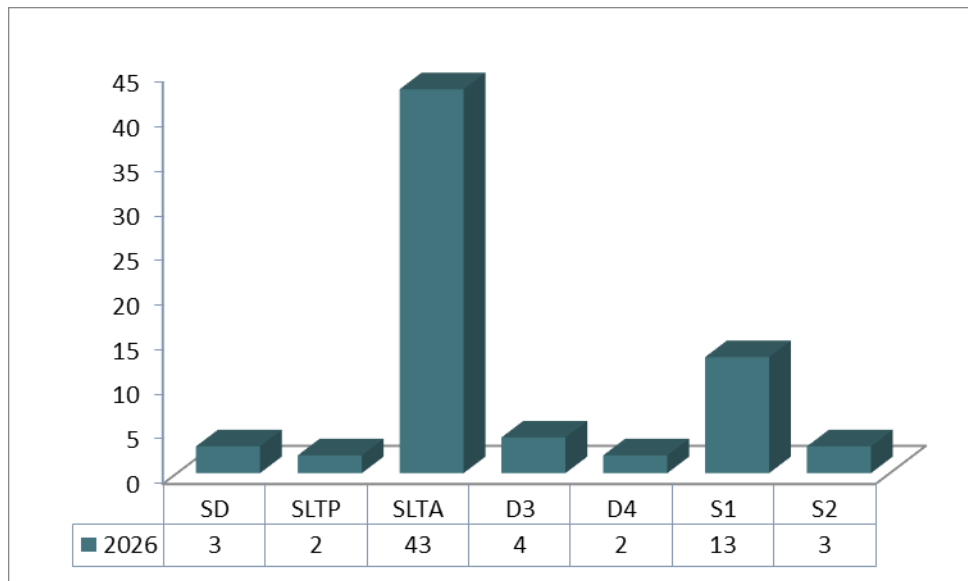
Gambar 3. Sebaran Pegawai BRPI Tahun 2026

Keragaan ASN BRPI berdasarkan jabatan pada tahun 2026 ialah sebagai berikut :



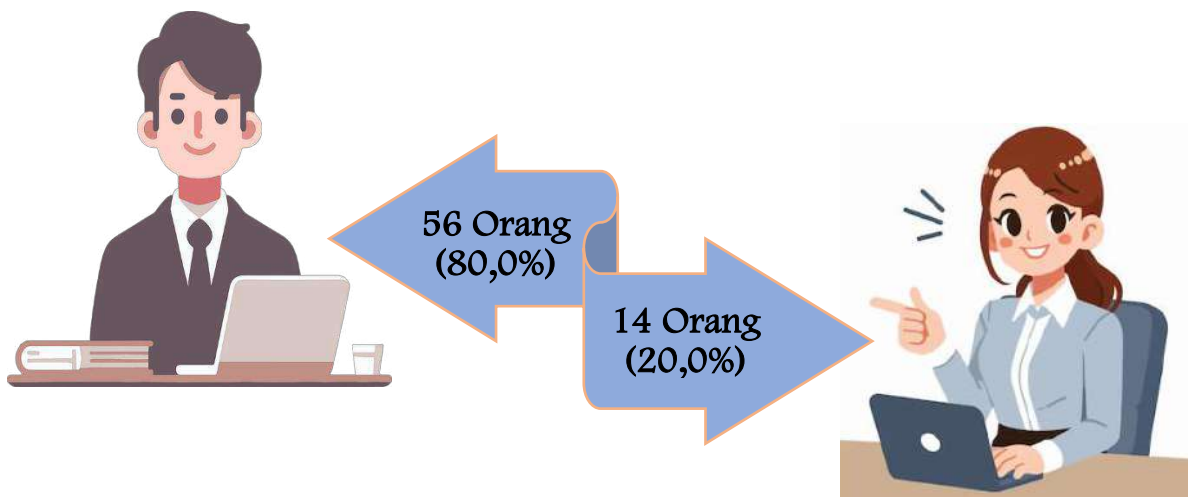
Gambar 4. Keragaan ASN BRPI Tahun 2026

Sementara itu sebaran seluruh pegawai menurut tingkat pendidikan pada tahun 2026 tersaji sebagai berikut :



Gambar 5. Sebaran Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2026

Dalam rangka peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia terdapat 1 orang pegawai Balai Riset Pemuliaan Ikan melaksanakan tugas belajar S3. Sebaran pegawai BRPI berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :



Gambar 6. Sebaran Pegawai BRPI Berdasarkan Gender

Dalam upaya mendukung program Pengarusutamaan Gender (PUG), BRPI telah melibatkan perempuan dalam kegiatan layanan magang PKL dan praktek kerja industri. Sampai dengan Triwulan II tahun 2026, BRPI telah menerima peserta magang PKL dan praktek kerja industri yang terdiri dari laki-laki 38,89% dan perempuan 61,11% dari total 54 orang.



1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BRPI sampai dengan tahun 2026, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) terhadap rencana kinerja (*performance plans*). Analisis tersebut memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya. Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

- **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama triwulan II tahun 2026;
- **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2026;
- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; dan
- **Bab IV – Penutup**, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap perlu.



1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.6.1. POTENSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BRPI didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fisik. Sumber daya fisik berupa aset kantor yang meliputi tanah, gedung dan bangunan kantor, tambak/kolam percobaan, laboratorium, ruang pertemuan dan perpustakaan. Keberadaan sumber daya manusia dan Iptek memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia BRPI terdiri atas jabatan struktural, tenaga jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum, dan tenaga kontrak. Jumlah pegawai BRPI yang berstatus ASN adalah sebanyak 26 orang PNS dan 11 orang PPPK, yang terbagi dalam beberapa ruang fungsi antara lain: 2 orang jabatan struktural, 9 orang jabatan fungsional tertentu (instruktur, teknisi kesehatan ikan, teknisi akuakultur, perencana, pranata komputer, pranata keuangan), dan 26 orang fungsional umum/tenaga administrasi.

Selain jumlah, kapasitas dan kapabilitas pegawai senantiasa diupayakan meningkat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan untuk menjalankan tugas dan fungsi BRPI. Kebutuhan terhadap SDM dengan kapasitas yang andal semakin dirasakan dalam rangka sertifikasi serta akreditasi laboratorium dan manajemen kantor. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia BRPI dilakukan melalui jalur magang maupun pelatihan jangka pendek, dan pelatihan jangka panjang (tugas belajar dan ijin belajar).

Kebutuhan tenaga fungsional dengan asumsi SOTK baru BRPI sebagai lembaga pelatihan diantaranya fungsional Instruktur, Widyaiswara, Analis Akuakultur, Teknisi Akuakultur, dan Teknisi Kesehatan Ikan. Sementara itu, untuk fungsional pendukungnya antara lain Perencana, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Pranata Humas, Arsiparis, Pustakawan, Pengelola Barang/ Jasa, Pranata Laksana Barang, Pranata Komputer, Analis dan Pranata SDM Aparatur.

b) Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial atau anggaran BRPI bersumber utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik dalam bentuk Rupiah Murni (RM)



maupun dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, kerja sama dengan beberapa institusi baik dalam negeri maupun luar negeri merupakan salah satu alternatif dalam memperoleh dana riset di BRPI.

Anggaran di BRPI terdiri dari anggaran untuk kebutuhan dukungan manajemen, layanan perkantoran, layanan jasa riset untuk masyarakat, serta pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana. Kebutuhan anggaran BRPI dengan asumsi SOTK baru sebagai lembaga pelatihan, maka pada tahun 2026 jumlah anggaran yang diterima BRPI menunjukkan kecenderungan menurun terutama untuk dukungan manajemen dan belanja operasional dari tahun ke tahun.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan terutama dilandaskan pada ketersediaan anggaran pemerintah (APBN). Namun demikian, dengan kondisi keuangan negara yang semakin terbatas, akan dilakukan upaya untuk mendapatkan dana insentif kegiatan dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain.

c) Sumber Daya Fisik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mencapai sasaran dan tujuan, BRPI mempunyai sumber daya fisik atau sarana dan prasarana penunjang yang memadai yang terletak di dalam kawasan seluas lebih dari 50 Ha. Sarana dan prasarana yang tersedia digunakan untuk kegiatan penelitian dan kegiatan administrasi penelitian. Sarana riset yang dimiliki BRPI adalah sebagai berikut:

1. Panti benih (*hatchery*) untuk setiap komoditas, yang dilengkapi dengan fasilitas pemijahan dan berbagai bak dengan jenis dan ukuran berbeda untuk pemeliharaan larva dan benih;
2. Perkolaman yang meliputi bak beton sejumlah 249 buah dengan ukuran 25, 50 dan 200 m² untuk pemeliharaan benih dan pengamatan keragaan kandidat ikan strain unggul; kolam tanah sejumlah 93 buah dengan ukuran 200 m² hingga 5.000 m² untuk pemeliharaan induk dan pemeliharaan pembesaran ikan kandidat strain unggul, serta reservoir atau kolam penampung air untuk menjaga kesinambungan pasokan air terutama pada musim kering;
3. Laboratorium Fisiologi dan Genetika, untuk melakukan pengamatan karakter genetik ikan, termasuk peralatan untuk melakukan transgenesis serta



Laboratorium Lingkungan, untuk melakukan pengamatan parameter kimiawi pada ikan dan kualitas lingkungan pemeliharaan ikan;

4. Peralatan dan mesin penunjang riset seperti pompa air, pompa aerasi, kincir, blower, alat berat (*excavator*), jaring, waring dan lain-lain.

Untuk menunjang kegiatan riset, BRPI dilengkapi dengan sarana pendukung dan prasarana administrasi yang meliputi antara lain:

1. Gedung Administrasi dengan luas total kurang lebih 1.540 m² terdiri dari Ruang Kepala, Ruang Administrasi, Ruang Peneliti dan Teknisi, Ruang Perpustakaan, Ruang Arsip, Ruang Ibadah dan Ruang Rapat serta Auditorium. Gedung Administrasi dilengkapi dengan jaringan internet, baik jaringan kabel maupun jaringan nirkabel;
2. Perumahan dinas pegawai yang terdiri dari berbagai ukuran rumah dinas mulai dari ukuran 36 m² sampai dengan 180 m² di dalam kawasan BRPI sehingga memudahkan pegawai untuk mendapatkan tempat tinggal;
3. Rumah Tamu (*Guest House*) dan asrama (*dormitory*) untuk menampung tamu dinas yang berkunjung dan mahasiswa atau siswa yang melakukan praktek, magang atau penelitian;
4. Kendaraan Operasional berupa mobil, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga.

1.6.2. PERMASALAHAN

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) dalam mendukung pembangunan KP yaitu belum terbitnya SOTK UPT terutama UPT eks riset. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tertuang pada pasal 290 bahwasannya Susunan Organisasi BPPSDM pada level Eselon II terdiri dari Sekretariat BPPSDMKP, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Dalam masa transisi organisasi pada level Unit Pelaksana Teknis (UPT), BRPI melaksanakan fungsi koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM berdasarkan Surat



Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDMKP. Dalam surat keputusan Kepala BPPSDMKP tersebut menetapkan bahwa Sekretariat BPPSDMKP melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan manajerial (meliputi perencanaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, hukum, organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan) terhadap 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) salah satunya Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI).



II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Riset Pemuliaan Ikan tahun 2025-2029 berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arahan bagi penyelenggaraan penelitian pemuliaan ikan budidaya dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan selama periode Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BRPI tahun 2025-2029, mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Renstra ini berfungsi sebagai instrument untuk mengelola segala sumber daya yang ada untuk menyusun perkiraan-perkiraan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan maka selanjutnya renstra memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi terkini terutama terkait adanya perubahan kebijakan. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah adanya proses evaluasi secara berkesinambungan sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan. Evaluasi ini dilakukan untuk menanggapi perubahan kondisi lingkungan strategis aktual yang terjadi di lingkup nasional, kementerian, atau sub sektor perikanan budidaya itu sendiri. Rencana Strategis (Renstra) BRPI tahun 2025-2029 dalam proses penyusunan sambil menunggu SOTK baru.

A. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Visi Presiden 2025-2029 adalah **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"**



Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

BPPSDM KP mempunyai visi spesifik yaitu ***“Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”***. Visi yang ditetapkan BRPI masih mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2020 yaitu **Menjadi lembaga riset yang inovatif dan terkemuka dibidang pemuliaan ikan budidaya**. Perubahan Visi, Misi, dan Tujuan UPT menunggu SOTK baru terbit.

B. Misi

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. BPPSDMKP melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan **Asta Cita 4**. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu ***“Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”***.

Misi BRPI merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi BRPI. Misi yang diemban oleh BRPI meliputi:

1. Menghasilkan varietas unggul melalui kegiatan riset pemuliaan ikan budidaya yang inovatif; serta
2. Mendiseminasikan varietas unggul ikan budidaya hasil pemuliaan dengan informasi dan Iptek pemuliaannya melalui pengembangan kapasitas SDM;

Dalam rangka menjalankan misi tersebut, BRPI merancang kegiatan yang dilaksanakan melalui sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme. Kegiatan di BRPI bersifat strategis dan berskala nasional sebagai penjabaran dari misi yang diemban dengan maksud untuk:



1. Merumuskan dan memecahkan permasalahan nasional di bidang penyediaan induk dan benih ikan unggul dalam upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan hidup masyarakat perikanan;
2. Menyediakan informasi teknis yang berhubungan dengan pemuliaan ikan budidaya untuk memenuhi fungsi sebagai institusi rujukan dalam bidang tersebut;
3. Mendukung kegiatan instansi terkait baik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain serta menjalin kerjasama dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri.

C. Tujuan

Tujuan BRPI dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan produk biologi yang dilengkapi dengan paket teknologi, data dan informasi ilmiah pendukung;
2. Menghasilkan data dan/atau informasi ikan ekonomis penting di Indonesia;
3. Mengembangkan kapasitas sumber daya riset melalui peningkatan jumlah dan kapasitas SDM, sarana dan prasarana riset serta sistem kerja yang dinamis dan kondusif;
4. Menyebarluaskan varietas unggul ikan budidaya hasil pemuliaan serta menjalin kerjasama penelitian pemuliaan ikan budidaya.

Tabel 2. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BRPI 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan
Menjadi lembaga riset yang inovatif dan terkemuka dibidang pemuliaan ikan budidaya	Misi 1. Menghasilkan varietas unggul melalui kegiatan riset pemuliaan ikan budidaya yang inovatif	Menghasilkan produk biologi yang dilengkapi dengan paket teknologi, data dan informasi ilmiah pendukung Menghasilkan data dan/atau informasi ikan ekonomis penting di Indonesia
	Misi 2. Mendiseminasikan varietas unggul ikan budidaya hasil pemuliaan beserta informasi dan lptek pemuliaannya melalui pengembangan kapasitas SDM	Mengembangkan kapasitas sumberdaya riset melalui peningkatan jumlah dan kapasitas SDM, sarana dan prasarana riset serta sistem kerja yang dinamis dan kondusif Menyebarluaskan varietas unggul ikan budidaya hasil pemuliaan serta menjalin kerjasama penelitian pemuliaan ikan budidaya



2.2. SASARAN KEGIATAN

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari :

- SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut
- SS-2 Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional
- SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan**
- SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas**

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM tahun 2025-2029, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran strategis KKP adalah sebagai berikut :

- SP-1 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- SP-2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP**

Dengan memperhatikan misi dan tujuan Balai Riset Pemuliaan Ikan tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 mengacu pada Sasaran Strategis KKP, dan Sasaran Program BPPSDM KP, maka sasaran kegiatan yang diturunkan ke Balai Riset Pemuliaan Ikan yaitu:

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Dengan mengacu pada sasaran kegiatan Sekretariat BPPSDM yang telah diturunkan (*cascading*) ke level 3 BRPI, maka sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan BRPI tahun 2026 adalah sebagai berikut:



1. Sasaran kegiatan **Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan** dengan Indikator Kinerja Kegiatan adalah:
 - 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI dengan target 85% pada tahun 2025 dan target 86% pada tahun 2026;
 - 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI dengan target nilai 92,0 pada tahun 2025 dan target 92,1 pada tahun 2026;
 - 3) Penilaian Mandiri SAKIP BRPI dengan target nilai 81 pada tahun 2025 dan 2026;
 - 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI dengan target nilai 71,50 pada tahun 2025 dan target nilai 71,75 pada tahun 2026;
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN BRPI dengan target 83 Indeks pada tahun 2025 dan 83,10 Indeks pada tahun 2026;
 - 6) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI dengan target nilai 71 pada tahun 2026;
 - 7) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPI dengan target 80% pada tahun 2025 dan target 77% pada tahun 2026;
 - 8) Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI dengan target 2 kemitraan pada tahun 2025 dan tahun 2026;
 - 9) Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI dengan target nilai 90 pada tahun 2025 dan tahun 2026; dan
 - 10) Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks) dengan target 2,98 Indeks pada bulan April tahun 2026.

Sebagai acuan sementara menggunakan Rancangan Indikator dan Target Kinerja BRPI Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. Rancangan Indikator dan Target Kinerja BRPI Tahun 2025-2029

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	85	86	87	88	89
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	81	81	81,5	81,7	81,8
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)	71,5	71,75	72	72,5	72,75
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	83	83,1	83,2	83,3	83,4
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)	-	71	71,25	71,5	71,75
		7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	80	77	78	79	80
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRPI (%)	80	-	-	-	-
		9	Nilai PNPB BRPI (Rupiah)	408.640.000	-	-	-	-
		10	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	2	2	3	4	4
		11	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	90	90	91	91,5	92
		12	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya BRPI (%)	100	-	-	-	-
		13	Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks)	-	2,98	3	3,15	3,25

2.3. RENCANA KERJA TAHUN 2026

Penjabaran dari visi, misi dan tujuan BRPI dituangkan dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta target-targetnya. Rencana Strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana dan target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya.

Rencana Kerja BRPI tahun 2026 mengalami satu kali perubahan, yakni pada tanggal 29 April 2026. Rencana Kerja Tahunan BRPI mengalami perubahan berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 1240/BPPSDM.1/RC.610/III/2026 tentang Perencanaan Kinerja Indikator Kinerja BPPSDM Level 2 dan 3 Tahun 2026 dan Surat Usulan Revisi Kepala BPPSDMKP ke Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : 777/BPPSDM/RC.420/IV/2026. Perubahan tersebut terkait penambahan Indikator Kinerja Kehumasan yang diturunkan (cascading) dari Sekretariat ke unit kerja Lingkup BPPSDM yaitu Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik dan adanya Revisi Efisiensi Anggaran (Penajaman Belanja) Lingkup BPPSDMKP yaitu pergeseran/relokasi anggaran ke BA BUN senilai Rp422.381.000,-. Adapun rincian Rencana Kerja Tahunan BRPI Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan BRPI 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
		AWAL	REV APRIL
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	86	86
	2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	92,1	92,1
	3 Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	81	81
	4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)	71,75	71,75
	5 Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	83,1	83,1
	6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)	71	71
	7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	77	77
	8 Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	2	2
	9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	90	90
	10 Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks)	-	2,98

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, BRPI perlu melakukan beberapa Langkah strategis untuk mencapai target kinerja organisasi salah satunya dengan melakukan Revisi Efisiensi Belanja. Anggaran Kegiatan yang telah dialokasikan tertuang dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) RKA-K/L BRPI tahun 2026. Alokasi pagu anggaran BRPI pada awal Tahun 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rupiah Murni (APBN-RM) yang semula dengan pagu Rp8.134.235.000,- menjadi Rp7.711.854.000,-. Berikut merupakan table perkembangan Rencana Anggaran Kegiatan BRPI selama Tahun 2026 :

**Tabel 5.** Rencana Anggaran Kegiatan BRPI Tahun 2026

No	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN DIPA AWAL (Rp.)	ANGGARAN DIPA REVISI APRIL (Rp.)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	365.751.000	-
	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	365.751.000	-
2	Program Dukungan Manajemen	7.768.484.000	7.711.854.000
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.755.204.000	7.707.811.000
	Layanan Manajemen SDM Internal	2.620.000	2.083.000
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10.660.000	1.960.000
Total Anggaran BRPI Tahun 2026		8.134.235.000	7.711.854.000

Pada bulan April terdapat Revisi Anggaran Penajaman Belanja Lingkup BPPSDMKP yaitu pergeseran/relokasi anggaran ke BA BUN dalam rangka efisiensi anggaran senilai Rp422.381.000,-. Setiap komponen dan sub komponen kegiatan dalam RKA-K/L disusun sesuai Rencana Kerja dan Bagan Akun Standar agar dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2026.

2.4. PERJANJIAN KINERJA 2026

Balai Riset Pemuliaan Ikan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPI dengan Sekretaris BPPSDM KP. Pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2026 tersebut terdapat satu sasaran kegiatan yang harus dicapai. Untuk setiap sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki minimal satu satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Keseluruhan IKK BRPI pada tahun 2026 berjumlah 10 (sepuluh) indikator. Perjanjian Kinerja BRPI pada tahun 2026 ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BRPI 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET AWAL	TARGET APRIL
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	86	86
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	92,1	92,1
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	81	81
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)	71,75	71,75



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET AWAL	TARGET APRIL
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	83,1	83,1
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)	71	71
		7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	77	77
		8	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	2	2
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	90	90
		10	Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks)	-	2,98

Perjanjian Kinerja BRPI tahun 2026 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala BRPI dengan Sekretaris BPPSDMKP. Perjanjian kinerja ini memuat Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Target IKK. Adapun IKK BRPI yang mendukung kinerja level 1 BPPSDMKP, yakni Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai).

Pada tanggal 29 April tahun 2026, Perjanjian Kinerja BRPI mengalami beberapa perubahan diantaranya :

- Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 1240/BPPSDM.1/RC.610/III/2026 tentang Perencanaan Kinerja Indikator Kinerja BPPSDM Level 2 dan 3 Tahun 2026. Sehingga revisi Perjanjian Kinerja (PK) BRPI bulan April terdapat penambahan Indikator Kinerja Kehumasan yang diturunkan (cascading) dari Sekretariat ke unit kerja Lingkup BPPSDM yaitu Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik;
- Perubahan penandatanganan pihak pertama, dimana sebelumnya Plt. Sekretaris BPPSDMKP a.n Dr. Joni Haryadi D, M.Sc menjadi Sekretaris BPPSDMKP a.n Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, S.Pi.,M.Si; serta
- Pagu anggaran mengalami pergeseran/relokasi anggaran ke BA BUN (Efisiensi Belanja) Lingkup BPPSDMKP sehingga dilakukan revisi anggaran dalam DIPA BRPI menjadi Rp7.711.854.000,- berdasarkan Surat Usulan Revisi Kepala BPPSDMKP ke Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : 777/BPPSDM/RC.420/IV/2026.



2.5. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja BRPI tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja sehingga akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Perhitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah :

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula perhitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi berbeda;
- 4) Status indeks capaian IKK adalah sebagai berikut :



Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKK pada masing-masing Indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja BRPI dilakukan secara berkala per triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan oleh tim yang melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja sebagaimana tertuang dalam Surat Tugas Kepala BRPI Nomor : B.6/BRPI/KP.440/I/2026 tanggal 2 Januari 2026. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggungjawab kegiatan melaporkannya kepada Sekretariat BPPSDMKP. Tahapan akhir dari proses ini adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja secara berjenjang oleh Sekretariat BPPSDM untuk memastikan kesesuaian antara capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku dan data dukung yang dilampirkan oleh satuan kerja lingkup Sekretariat BPPSDM.

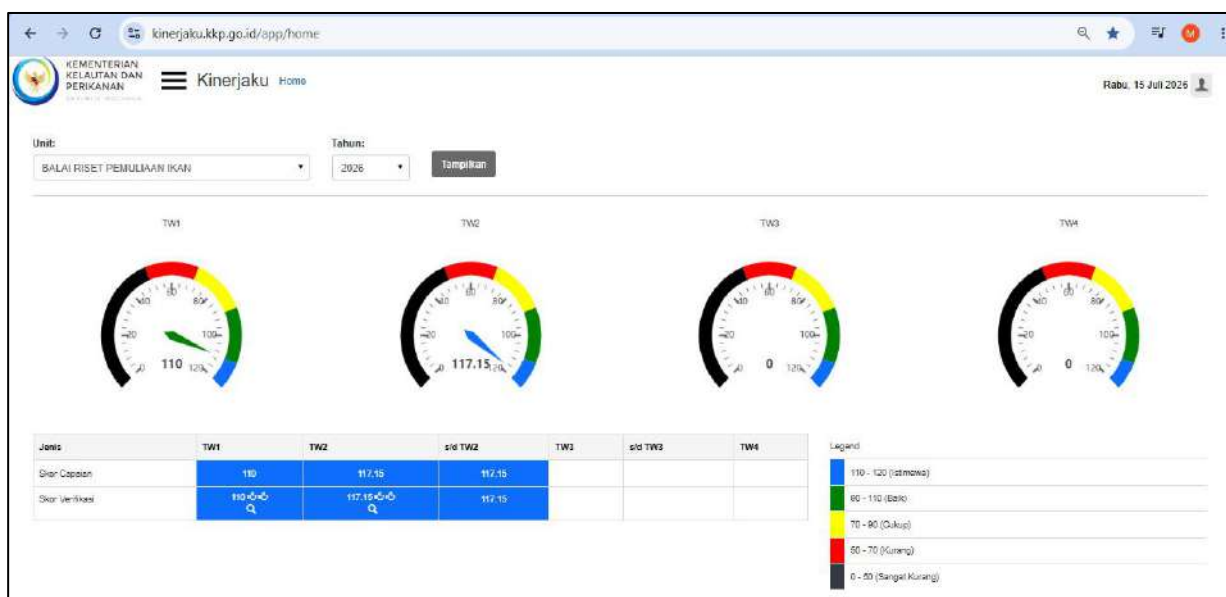


III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PRESTASI KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI). Pengukuran kinerja merupakan suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada Penetapan Kinerja BRPI dapat tercapai.

Pengukuran capaian kinerja BRPI pada triwulan II tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, capaian nilai kinerja organisasi BRPI pada triwulan II tahun 2026 adalah sebesar **117,15%** sebagaimana tersaji dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 7. Dashboard Capaian Kinerja BRPI Triwulan II Tahun 2026

Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2026 (www.kinerjaku.kkp.go.id)

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, capaian kinerja BRPI terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja yang telah tercapai. Nilai kinerja BRPI pada masing-masing Indikator bernilai baik dan sangat baik (istimewa) dengan nilai capaian sesuai dan/ atau melebihi



target yang telah ditentukan. Dari keseluruhan capaian Indikator Kinerja pada pengukuran triwulan II memperoleh persentase nilai capaiannya melebihi 100% diantaranya IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI dengan capaian 116,28%, IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI dengan perolehan capaian 119,37%, IKK Indeks Profesionalitas ASN BRPI dengan capaian 112,95%, dan IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI dengan capaian 120,00%.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPI. Berikut capaian Indikator Kinerja BRPI pada triwulan II tahun 2026:

Tabel 7. Capaian Kinerja BRPI Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2026	TARGET TRIWULAN II 2026	REALISASI TRIWULAN II 2026	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	86,00	86,00	100,00	116,28
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	92,10	83,00	99,08	119,37
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	81,00	-	-	-
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)	71,75	-	-	-
		5.	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	83,10	76,00	85,84	112,95
		6.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)	71,00	-	-	-
		7.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	77,00	77,00	100,00	120,00



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2026	TARGET TRIWULAN II 2026	REALISASI TRIWULAN II 2026	%
		8. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	2,00	-	-	-
		9. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	90,00	-	-	-
		10. Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks)	2,98	-	-	-

Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2026 (www.kinerjaku.kkp.go.id)

Secara umum nilai capaian kinerja BRPI pada triwulan II tahun 2026 masuk kategori sangat baik (istimewa) dikarenakan terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan persentase capaian 120% yaitu IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI dan ke-3 Indikator Kinerja lainnya memperoleh nilai capaian melebihi 100% diantaranya IKK Indeks Profesionalitas ASN BRPI dengan capaian 112,95%, IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI dengan capaian 116,28%, serta IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI dengan perolehan capaian 119,37%.

3.2.1. SASARAN KEGIATAN Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan tersebut terdiri dari 10 (Sepuluh) IKK yaitu :

IKK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI merupakan Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Itjen** yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **TUNTAS**) oleh BRPI sampai dengan waktu pengukuran. Pengukuran indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan BRPI ini dilakukan secara triwulanan dengan target 86,00%. Capaian atas indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan sebagai berikut:



Tabel 8. Capaian IKK 1 BRPI Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKK 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)									
Realisasi TW II 2023-2025			Tahun 2026					Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2023	2024	2025	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
75,00	82,00	85,00	86,00	86,00	100,00	116,28	17,65	89,00	112,36

Sampai dengan triwulan II tahun 2026, Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI ini tercapai 100,00% dari target 86,00% atau setara dengan persentase capaian 116,28%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2025, Indikator kinerja ini mengalami kenaikan dengan persentase kenaikan sebesar 17,65%. Hal ini dikarenakan pada tahun ini BRPI menjadi uji petik pengawasan oleh Itjen dan telah tuntas menindaklanjuti hasil rekomendasi sehingga diperoleh capaian 100%. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dan 2023, indikator kinerja ini mengalami kenaikan nilai dengan persentase sebesar 21,95%-33,33%. Sementara itu bila dibandingkan dengan Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI pada triwulan II ini terhadap target 2029 tercapai 112,36% dari target 89,00%.

UPT lingkup Sekretariat BPPSDM yang menjadi uji petik pengawasan Itjen periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Maret 2026 (Triwulan IV Tahun 2025 s.d Triwulan I Tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 Juni Tahun 2026 (Triwulan II tahun 2026) yaitu BRPI dengan realisasi capaian 100% telah tuntas ditindaklanjuti. Sedangkan untuk Satker yang tidak ada LHP atau sebagai obyek Pengawasan pada periode pelaporan, maka nilai capaian sesuai target yaitu 86,00%. Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI ini tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris BPPSDM Nomor : 2801/BPPSDM.1/HP.510/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 tentang Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026 Lingkup BPPSDM KP". Berikut capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan UPT lingkup Sekretariat BPPSDM pada triwulan II tahun 2026 :



Tabel 9. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan UPT Lingkup Sekretariat BPPSDM TW II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Rekomendasi Hasil Pengawasan		% Capaian
		Target (%)	Realisasi (%)	
1	Balai Riset Pemuliaan Ikan	86,00	100,00	116,28
2	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	86,00	86,00	100,00
3	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	86,00	86,00	100,00
4	Balai Riset Perikanan Laut	86,00	86,00	100,00
5	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	86,00	86,00	100,00
6	Loka Riset Perikanan Tuna	86,00	86,00	100,00
7	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	86,00	86,00	100,00
8	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	86,00	86,00	100,00
9	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	86,00	86,00	100,00

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini diantaranya menyusun laporan keuangan dan BMN, pengendalian rutin SPIP, serta melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah menindaklanjuti hasil pemantauan pertanggungjawaban keuangan TA 2025 oleh Itjen III.

Upaya-upaya yang mendukung tercapainya Indikator kinerja ini karena didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen pimpinan dan tim pengendalian intern yang terintegrasi dalam memonitoring kegiatan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya secara kontinu.

IKK 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)

Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran dapat dilihat pada aplikasi **MyIntress (My Integrated Treasury System)** pada website (<https://myintress.kemenkeu.go.id/>). Nilai kinerja tersebut berubah secara *real time* selaras dengan realisasi keuangan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Anggaran. Indikator Kinerja ini ditetapkan untuk mengukur



aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi BRPI yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Tabel 10. Capaian IKK 2 BRPI Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKK 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)									
Realisasi TW II 2023-2025			Tahun 2026					Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2023	2024	2025	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
97,50	96,53	100,00	92,10	83,00	99,08	119,37	-0,92	92,2	107,46

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2026, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI ditetapkan dengan target nilai 92,1 dan pengukuran dilakukan secara semesteran. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI pada triwulan II tahun 2026 diperoleh nilai 99,08 atau setara dengan 119,37% dari target 83,00. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2025, Indikator kinerja ini mengalami penurunan capaian dengan persentase -0,92%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan nilai pada komponen penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP belum mencapai maksimal. Meskipun demikian, nilai IKPA sebesar 99,08 menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran tetap berada pada kategori sangat baik. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023, indikator kinerja ini mengalami kenaikan nilai dengan persentase 2,64% dan 1,72%. Sementara itu bila dibandingkan dengan Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI pada triwulan II ini terhadap target 2029 tercapai 107,46% dari target 92,2%.

Realisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada triwulan II ini apabila dibandingkan dengan capaian UPT lingkup Sekretariat BPPSDM, Nilai BRPI termasuk dalam kategori sangat baik yaitu ≥ 95 . Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI ini tertuang dalam Nota Dinas dari Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor : 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026. Berikut capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT lingkup Sekretariat BPPSDM pada triwulan II tahun 2026 :



Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT Lingkup Sekretariat BPPSDM TW II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Nilai IKPA TW II		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	Loka Riset Perikanan Tuna	83,00	100	120,00
2	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	83,00	100	120,00
3	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	83,00	99,96	120,00
4	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	83,00	99,91	120,00
5	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	83,00	99,44	119,81
6	Balai Riset Pemuliaan Ikan	83,00	99,08	119,37
7	Balai Riset Perikanan Laut	83,00	98,88	119,13
8	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	83,00	98,84	119,08
9	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	83,00	97,73	117,75

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja ini sampai triwulan II diantaranya penyampaian data kontrak secara tepat waktu, pengelolaan TUP secara proposional, mengajukan pemutakhiran Halaman III DIPA dengan pengesahan, melakukan percepatan penyerapan anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian output kegiatan maupun realisasi keuangan secara berkala, serta memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan secara tepat waktu (17 hari kerja).

Upaya-upaya yang mendukung tercapainya Indikator kinerja ini karena didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah terlaksananya proses administrasi keuangan dengan baik yang dilakukan BRPI dalam pengelolaan keuangannya, adanya perencanaan dari pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilakukan pemantauan berkala terhadap capaian kegiatan maupun realisasi keuangan setiap bulannya serta melaksanakan aspek-aspek nilai kinerja pelaksanaan anggaran dengan baik. Selain itu, pendukung tercapainya indikator ini juga dipengaruhi oleh komitmen Kepala Balai dan adanya koordinasi yang baik dari penanggung jawab kegiatan dengan tim keuangan BRPI serta terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya secara kontinu.

IKK 3. Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan



evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP BRPI dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP BRPI merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di internal BRPI. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Sekretariat BPPSDM KP dan/atau Inspektorat Jenderal KKP, dan data capaian rilis melalui surat dari Sekretariat BPPSDM KP dan/atau Inspektorat Jenderal.

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP BRPI ini ditargetkan pada akhir tahun 2026 dengan nilai target 81,00 (delapan puluh satu). Sampai dengan triwulan II tahun 2026, indikator kinerja ini belum dapat diukur karena target ditetapkan pada akhir tahun.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai triwulan II dalam mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja ini diantaranya ketersediaan data dukung SAKIP selama lebih dari 5 tahun seperti Dokumen Perencanaan Kinerja TA 2026 (Perjanjian Kinerja, Manual IK, Renaksi, Rincian Target IK), Evaluasi Renaksi, Laporan Kinerja TA 2025 hasil Reviu BPPSDM berikut bukti dukungnya, terpenuhinya form matriks LKE SAKIP sampai TW I 2026, terpenuhinya tindak lanjut hasil reviu SAKIP TA 2025, telah melakukan penginputan pada aplikasi DSMS BPPSDM, serta adanya implementasi SAKIP dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien. Selain itu juga telah dilakukan pendampingan penilaian mandiri SAKIP secara berjenjang dan berkelanjutan oleh Sekretariat BPPSDM pada tanggal 7 Mei – 19 Juni 2026. BRPI telah mengikuti pendampingan penilaian mandiri dan verifikasi bukti dukung LKE SAKIP level 3 pada Zona 5 di BRBIH Depok secara Hybrid yang diselenggarakan oleh Sekretariat BPPSDM pada tanggal 17 – 19 Juni 2026. Berdasarkan hasil verifikasi bukti dukung, nilai SAKIP BRPI tahun 2026 diperoleh nilai 83,65 dengan kategori A (Memuaskan) dari target dalam Perjanjian Kinerja adalah senilai 81,00.

Upaya-upaya yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini diantaranya komitmen Kepala Balai dan adanya koordinasi yang baik dari penanggung jawab kegiatan dengan tim SAKIP BRPI serta terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya secara kontinu. Selain itu, pendukung tercapainya indikator ini juga dipengaruhi adanya pendampingan SAKIP dan penyusunan LKj oleh Sekretariat BPPSDM.



IKK 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemeneu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektifitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pada tahun 2026, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI memiliki target 71,75 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh lima) dan periode pelaporan diukur pada akhir tahun. Sampai dengan triwulan II tahun 2026, indikator kinerja ini belum dapat diukur karena target ditetapkan pada akhir tahun.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai triwulan II dalam mencapai indikator ini yaitu menginput target dan realisasi capaian output bulan Januari-Juni serta melakukan penyesuaian antara lain terkait dengan informasi kinerja, target, rencana penarikan dana, dan capaian sasaran program melalui aplikasi SAKTI modul komitmen, mengeksekusi penyerapan anggaran bulanan dan melakukan revisi anggaran yang diperlukan menjadi solusi pencapaian, serta menjaga nilai indeks realisasi anggaran agar selaras dengan indeks SBKU.

Faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian IKK ini diantaranya pengelolaan keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sinergi, kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksana anggaran, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan secara kontinu.

IKK 5. Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.



Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap Tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No.38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IP ASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IP ASN.

Tabel 12. Capaian IKK 5 BRPI Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKK 5. Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)									
Realisasi TW II 2023-2025			Tahun 2026					Target Kinerja BRPI Tahun 2025-2029	
2023	2024	2025	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
78,00	87,93	85,60	83,10	76,00	85,84	112,95	0,28	83,40	102,93

Indeks Profesionalitas ASN BRPI pada tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 83,1 (delapan puluh tiga koma satu) indeks dan pengukuran dilakukan secara semesteran. Sampai dengan triwulan II tahun 2026, capaian indikator Indeks Profesional ASN BRPI diperoleh sebesar 85,84 dari target TW II 76,00 indeks atau setara dengan persentase 112,95%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2025 dan 2023, Indikator kinerja ini mengalami kenaikan capaian dengan persentase senilai 0,28% dan 10,05%. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan pada nilai komponen kualifikasi dan kinerja Pegawai. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2024, indikator kinerja ini mengalami penurunan nilai indeks dengan persentase senilai -2,38% dikarenakan terdapat pegawai yang belum mengikuti diklat fungsional serta diklat 20 JP sehingga capaiannya belum maksimal dan berpengaruh terhadap capaian IP ASN pada TW II 2026. Sementara itu bila dibandingkan dengan Target Kinerja BRPI Tahun 2025-2029, capaian Indeks Profesional ASN BRPI pada triwulan II ini terhadap target 2029 tercapai 102,93% dari target 83,40%.

Realisasi capaian Indeks Profesionalitas ASN BRPI pada triwulan II apabila dibandingkan dengan capaian UPT lingkup Sekretariat BPPSDM terhitung baik, BRPI berada di posisi ke-8 dengan indeks 85,84 dengan kategori Tinggi. Semua satker telah mencapai target yang telah ditetapkan dan rata-rata masuk dalam kategori tinggi.



Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN ini tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris BPPSDM dengan Nomor : 2816/BPPSDM.1/KP.720/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Semester I Tahun 2026 Lingkup BPPSDM. Berikut capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT lingkup Sekretariat BPPSDM triwulan II tahun 2026 :

Tabel 13. Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT Lingkup Sekretariat BPPSDM TW II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Indeks IP ASN TW II		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	76,00	90,80	119,47
2	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	76,00	90,66	119,29
3	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	76,00	90,53	119,12
4	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	76,00	90,24	118,74
5	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	76,00	89,50	117,76
6	Loka Riset Perikanan Tuna	76,00	89,07	117,20
7	Balai Riset Perikanan Laut	76,00	87,30	114,87
8	Balai Riset Pemuliaan Ikan	76,00	85,84	112,95
9	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	76,00	85,28	112,21

Kegiatan yang telah dilakukan sampai triwulan II dalam menunjang keberhasilan capaian Indeks profesionalitas ASN ini yaitu telah dilakukan sosialisasi dan asistensi diklat e-milea, mengikuti diklat 20 JP, updating info seminar dan pelatihan untuk seluruh pegawai, verifikasi dan penilaian SKP per triwulan, serta monitoring pengembangan kompetensi dan disiplin pegawai.

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adanya upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme dari seluruh pegawai BRPI melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan secara daring, adanya tim pengelola kepegawaian yang secara intens dalam memonitoring terkait pergerakan nilai IP ASN seperti memberikan info pelatihan-pelatihan/diklat/seminar, serta adanya keaktifan pegawai dan operator dalam pemutakhiran data (mengunggah sertifikat dan melakukan entri data pada aplikasi SIASN) sehingga target indikator kinerja ini dapat tercapai dengan baik.

IKK 6. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan



secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan kearsipan internal dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: (1) Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) yang terdiri dari beberapa komponen diantaranya penciptaan arsip (25%), penggunaan arsip (25%), pemeliharaan arsip (25%), dan penyusutan arsip (25%); serta (2) Sumber Daya Kearsipan (bobot 50%) dengan komponen pendukung sumber daya manusia kearsipan (50%), dan prasarana dan sarana (50%).

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI pada tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 71 (tujuh puluh satu) dan pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Sampai dengan triwulan II tahun 2026, Indikator ini belum dapat diukur karena target ditetapkan pada akhir tahun 2026.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai triwulan II tahun 2026 dalam menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini diantaranya telah melakukan penataan arsip dinamis dan statis, melakukan pengelolaan arsip berbasis elektronik (membuat naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku, menandatangani menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) terverifikasi, naskah dinas ditindaklanjuti oleh pimpinan melalui aplikasi portal, dan pemberkasan arsip aktif), serta melakukan pengelolaan arsip berbasis konvensional. Selain itu juga telah dilakukan pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi pengawasan kearsipan sebagai bagian dari persiapan evaluasi serta mengikuti pendampingan dari Sekretariat BPPSDM dalam proses pengukuran dan penilaian pengawasan kearsipan tahun 2026 guna memastikan kesesuaian, kelengkapan, dan kualitas pemenuhan dokumen pendukung.

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah kelengkapan dokumen yang mendukung aspek-aspek penilaian nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI serta setiap aspek dilakukan monitoring terhadap dokumen-dokumen secara berkala.



IKK 7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPI (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan belanja non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Capaian atas indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPI sebagai berikut :

Tabel 14. Capaian IKK 7 BRPI Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKK 7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)									
Realisasi TW II 2023-2025			Tahun 2026					Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2023	2024	2025	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd Target 2029
-	-	100,00	77,00	77,00	100,00	120,00*	0,00	80,00	120,00*

Keterangan: *) Persentase melebihi 120,00% akan dikonversi menjadi 120,00%

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI pada tahun 2025 dengan target 80,00 (delapan puluh) % dan pengukuran dilakukan secara triwulanan. Sampai dengan triwulan II tercapai 100,00% dari target 77,00% atau setara dengan persentase capaian 120,00%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2025), capaian indikator ini memiliki capaian yang sama yaitu 100,00%. Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu



tahun 2023-2024 dikarenakan indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025. Sementara itu bila dibandingkan dengan Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPI pada triwulan II tahun 2026 ini terhadap target 2029 telah tercapai senilai 120,00% dari target 80,00%.

Realisasi capaian Indikator Kinerja ini bila dibandingkan dengan capaian UPT lingkup Sekretariat BPPSDM, BRPI memiliki capaian sama dengan satker lainnya yaitu 100,00%. Capaian indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPI ini tertuang dalam Nota Dinas Sekretaris BPPSDM Nomor : 2798/BPPSDM.1/PL.410/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Berikut capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP UPT lingkup Sekretariat BPPSDM pada triwulan II tahun 2026 :

Tabel 15. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP UPT Lingkup Sekretariat BPPSDM Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	RUP PBJ Terumumkan pada SIRUP		% Capaian
		Target (%)	Realisasi (%)	
1	Balai Riset Pemuliaan Ikan	77,00	100,00	120,00
2	Balai Riset Budidaya Ikan Hias	77,00	100,00	120,00
3	Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	77,00	100,00	120,00
4	Balai Riset Perikanan Laut	77,00	100,00	120,00
5	Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	77,00	100,00	120,00
6	Loka Riset Perikanan Tuna	77,00	100,00	120,00
7	Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	77,00	100,00	120,00
8	Loka Riset Budidaya Rumput Laut	77,00	100,00	120,00
9	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	77,00	100,00	120,00

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini diantaranya telah melakukan identifikasi dan tagging belanja pengadaan dan non pengadaan pada aplikasi SIRUP, melakukan input data dan mengumumkan belanja pengadaan pada aplikasi SIRUP berdasarkan pagu awal RKA-KL, dan melakukan revisi belanja pengadaaan yang telah terumumkan pada aplikasi SIRUP berdasarkan pagu hasil revisi efisiensi anggaran.

Upaya-upaya yang mendukung tercapainya Indikator kinerja ini karena didukung oleh beberapa faktor diantaranya adanya komitmen pimpinan dan PPK yang terintegrasi dalam memonitoring kegiatan, terlaksananya monitoring dan evaluasi



setiap pelaksanaan kegiatannya secara kontinu, serta melakukan penginputan data pada aplikasi SIRUP secara tertib.

IKK 8. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)

Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara BRPI dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN BRPI. Kegiatan kerjasama dilakukan atas dasar kepentingan bersama untuk mencapai kemanfaatan bersama. Kegiatan kerjasama sangat diperlukan oleh setiap institusi, dalam hal ini BRPI, salah satunya sebagai sarana dalam menyampaikan dan menyebarluaskan output yang telah dihasilkan.

Indikator Kinerja Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI pada tahun 2026 ini ditargetkan 2 (dua) Kemitraan di bidang pengembangan SDM KP dan Pakan Formulasi Indukan Ikan serta periode pelaporan diukur pada akhir tahun. Sampai dengan triwulan II, indikator kinerja ini belum dapat diukur dikarenakan target ditetapkan pada akhir tahun.

Kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan tercapainya indikator kinerja Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti BRPI sampai dengan triwulan II tahun 2026 yaitu melakukan inisiasi dengan calon mitra PKS, telah teregister PKS dengan Politeknik Negeri Subang oleh Sekertariat BPPSDMKP dengan Nomor. 34/BPPSDM/KKP/PKS/V/2026, serta telah dilakukan penandatanganan PKS antara BRPI dengan Politeknik Negeri Subang. Selain itu juga telah terlaksananya hasil dari implementasi Kerjasama tahun 2024 yang telah disepakati dalam naskah perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak diantaranya telah dilakukan kegiatan magang industri Sekolah vokasi Institut Pertanian Bogor dalam bidang pembenihan ikan gurami bima, nila srikandi dan ikan lele Mutiara; Bimbingan dan pendampingan kegiatan Ilmiah Mahasiswa sekolah vokasi; serta Pengujian dan penilaian magang industri sekolah vokasi bertujuan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa selama magang.

Faktor pendukung tercapainya indikator Kemitraan BRPI ini adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan, perbanyak akses jaringan kolaborasi dengan kelompok pembudidaya, pengusaha, dan calon mitra kerjasama, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya secara kontinu.



IKK 9. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Undang-Undang tersebut mendorong badan publik untuk mengatur dan memperjelas kebijakan terkait layanan informasi publik secara sistematis. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai wujud komitmen selaku badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas serta menjadi landasan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI pada tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 90,00 (sembilan puluh) dan periode pelaporan diukur pada akhir tahun. Sampai dengan triwulan II tahun 2026, Indikator ini belum dapat diukur karena target ditetapkan pada akhir tahun 2026.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI sampai dengan triwulan II diantaranya telah mengumumkan informasi publik pada website ppid.kkp.go.id meliputi Dokumen Perencanaan Kinerja, Realisasi Anggaran, Pelaporan, Data Permintaan Informasi Publik, Daftar Akses Informasi Publik, Mekanisme atau Prosedur Pelayanan Informasi Publik, Informasi FAQ, Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi BRPI, Informasi Serta Merta (Informasi Gempa, Perkiraan Cuaca, dll), serta Informasi Setiap Saat (Struktur Organisasi & Tata Kerja BRPI, Daftar Surat Masuk & Keluar, dll); Memperbaharui maklumat pelayanan TA 2026; Maintenance ruang pelayanan informasi; Melaksanakan Survei Kepuasan Informasi Publik TW II TA 2026; Mengisi SAQ penilaian KIP-PPID pada aplikasi Pelikan; Mengikuti Agenda Pertemuan Zoom Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri “Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP TA 2026; Mengikuti Kegiatan Pendampingan Pengisian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP TA 2026; serta Menyusun Laporan Survei Layanan Informasi Publik dan Laporan Monev PPID TW II TA 2026.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatannya secara kontinu.



IKK 10. Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah nilai hasil pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023.

Indeks Pelayanan Publik BRPI pada tahun 2026 ditargetkan dengan nilai 2,98 (dua koma Sembilan delapan) indeks dan periode pelaporan diukur pada akhir tahun. Sampai dengan triwulan II tahun 2026, Indikator ini belum dapat diukur karena target ditetapkan pada akhir tahun 2026.

Kegiatan yang dilakukan dalam proses mencapai keberhasilan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik BRPI sampai dengan triwulan II diantaranya memberikan pelayanan prima terhadap customer, telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik, menyusun Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, melakukan Survey Kepuasan Masyarakat TW II (Layanan Konsultasi Bimbingan Teknis, Layanan Pengujian Laboratorium, serta Layanan Penggunaan Tanah dan/atau Sewa), dan melakukan pengisian form Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta pemenuhan bukti dukung setiap indikator Pelayanan.

Faktor pendukung tercapainya Indikator Kinerja ini adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan sesuai standar, didukung dengan SDM yang kompeten, serta pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan pengguna layanan secara berkelanjutan.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2026, BRPI mengelola anggaran sebesar 8.134.235.000,- yang bersumber dari APBN dan digunakan untuk membiayai capaian 10 Indikator Kinerja yang merupakan



mandatori dari Sekretaris BPPSDM. Pagu anggaran BRPI setelah revisi efisiensi belanja menjadi Rp7.711.854.000,- dan sampai dengan triwulan II tahun 2026 telah terealisasi senilai Rp3.901.552.445,- atau setara dengan 50,59% berdasarkan aplikasi MyIntress per tanggal 30 Juni 2026. Berikut rincian realisasi anggaran per jenis belanja sampai Bulan Juni tahun 2026 :

Tabel 16. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja sampai Bulan Juni Tahun 2026

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	4.312.273.000	4.312.273.000	2.477.740.700	57,46
2	Belanja Barang	3.821.962.000	3.399.581.000	1.423.811.745	41,88
Total Belanja		8.134.235.000	7.711.854.000	3.901.552.445	50,59

Sumber : Aplikasi MyIntress tahun 2026 (30 Juni 2026)

Sampai dengan triwulan II tahun Anggaran 2026 realisasi belanja pegawai sebesar 57,46% sedangkan realisasi belanja barang sebesar 41,88%. Belanja pegawai direalisasikan secara rutin setiap awal bulan, sedangkan belanja barang direalisasikan sesuai dengan kebutuhan setiap kegiatan.

Selama triwulan II tahun 2026, BRPI melakukan revisi anggaran sebanyak 6 (enam) kali dikarenakan adanya perkembangan kebijakan. Berikut kronologis revisi anggaran BRPI pada triwulan II tahun 2026 :

Tabel 17. Kronologi Revisi Anggaran BRPI Triwulan II Tahun 2026

DIPA	TANGGAL	PAGU	PENETAPAN/PENGESAHAN	KETERANGAN
Awal	1 Desember 2025	8.134.235.000	SP DIPA- 032.12.2.403832/2026	
Revisi 1 Kewenangan DJA	31 Desember 2025	8.134.235.000	Nomor : S-1158/AG/AG.3/2025	Prioritas Direktif Presiden
Revisi 2 Kewenangan Satker	11 Februari 2026	8.134.235.000	Nomor : 158/BRPI/KPA/RC.420/II/2026	POK dan Halaman III DIPA
Revisi 3 Kewenangan DJA	2 Maret 2026	8.134.235.000	Nomor : S-79/AG/AG.3/2026	Revisi Buka Blokir Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel
Revisi 4 Kewenangan Satker	14 April 2026	8.134.235.000	Nomor : 347/BRPI/KPA/RC.420/IV/2026	POK dan Halaman III DIPA
Revisi 5 Kewenangan DJA	23 April 2026	7.711.854.000	Nomor : S-247/AG/AG.3/2026	Revisi Anggaran Penajaman Belanja (Realokasi ke BA BUN)
Revisi 6 Kewenangan Satker	7 Mei 2026	7.711.854.000	Nomor : 418/BRPI/KPA/RC.420/V/2026	POK dan Halaman III DIPA

Sumber : Aplikasi SAKTI (<https://sakti.kemenkeu.go.id/>)



Pagu anggaran BRPI yang bersumber dari APBN dipergunakan untuk membiayai capaian 10 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam 1 Sasaran Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”. Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2026 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 18. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDM KP				
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7.711.854.000	3.901.552.445	50,59%
Jumlah Total Anggaran		7.711.854.000	3.901.552.445	50,59%

Sumber : Aplikasi SAKTI (<https://sakti.kemenkeu.go.id/>)

Sementara itu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka disusun kegiatan-kegiatan dalam RKA-K/L yang mendukung pencapaian masing-masing indikator kinerja. Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran masing-masing IK dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 19. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase (%)	Target TW II Kegiatan	Capaian TW II Kegiatan	Satuan Target Kegiatan
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	980.000	150.000	15,31%	86	86	%
	2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	4.313.253.000	2.476.640.200	57,42%	83	-	Nilai
	3 Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	980.000	150.000	15,31%	-	-	Nilai
	4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)				-	-	Nilai
	5 Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	2.083.000	150.000	7,20%	76	-	Indeks
	6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)	2.720.000	1.200.000	44,12%	-	-	%
	7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	3.387.636.000	1.422.462.245	41,99%	77	100	%
	8 Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	1.127.000	-	0,00%	-	-	Rupiah
	9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	3.075.000	800.000	26,02%	-	-	Kemitraan
	10 Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks)				-	-	Indeks
JUMLAH		7.711.854.000	3.901.552.445	50,59%			

Sumber : Aplikasi SAKTI (<https://sakti.kemenkeu.go.id/>)

Secara umum kinerja BRPI sampai dengan triwulan II tahun 2026 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasilkan dapat tercapai secara optimal. Namun



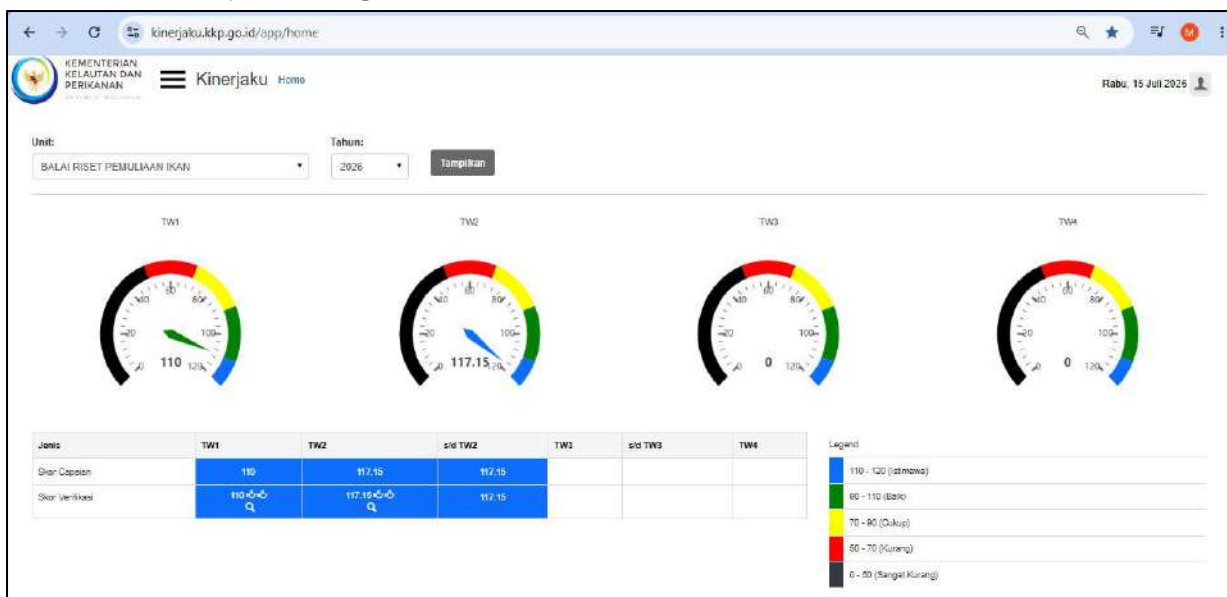
demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan rencana operasional kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja BRPI pada triwulan II tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa Balai Riset Pemuliaan Ikan berhasil mencapai **Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan/ Nilai Kinerja Organisasi** sebesar **117,15%** dengan status sangat baik, sebagaimana tersaji pada *dashboard* kinerjajaku sebagai berikut :



Gambar 8. Report Capaian Kinerja BRPI Triwulan II Tahun 2026

Sumber : Aplikasi Kinerjajaku Tahun 2026 (www.kinerja.kkp.go.id)

Sampai dengan triwulan II tahun 2026 telah dilakukan pengukuran pada 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran, keempat indikator kinerja tersebut telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan dan masuk kategori sangat baik (istimewa). Data dukung capaian Balai Riset Pemuliaan Ikan telah diunggah melalui [https://bit.ly/DataDukungCapaianKinerjaBRPITWII 2026](https://bit.ly/DataDukungCapaianKinerjaBRPITWII2026). Berikut rincian capaian kinerja BRPI yang telah terealisasi pada triwulan II tahun 2026 :

1. IKK 1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%) telah terealisasi capaian sebesar 86,00% dari target triwulan II yaitu 86,00% atau setara dengan persentase capaian 100,00%;



2. IKK 2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai) telah terealisasi capaian senilai 99,08 dari target triwulan II dengan nilai 83,00 atau setara dengan persentase capaian 119,37%;
3. IKK 5 Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks) telah terealisasi capaian sebesar 85,84 Indeks melebihi target triwulan II yang ditetapkan yaitu sebesar 76,00 atau setara dengan persentase capaian sebesar 112,95%; dan
4. IKK 7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPI (%) telah terealisasi capaian sebesar 100,00% melebihi target yang ditetapkan pada triwulan II yaitu 77,00% atau setara dengan persentase capaian sebesar 120,00%.

Secara akuntabilitas keuangan, pagu anggaran BRPI tahun 2026 setelah revisi efisiensi belanja yaitu Rp7.711.854.000,- dan sampai dengan triwulan II tahun 2026 telah terealisasi senilai Rp3.901.552.445,- atau setara dengan 50,59% berdasarkan aplikasi MyIntress per tanggal 30 Juni 2026 untuk mencapai target-target kesepuluh Indikator Kinerja.

4.2. PERMASALAHAN, REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT

Secara umum kinerja BRPI pada triwulan II tahun 2026 sudah sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan upaya perbaikan kedepan diantaranya :

Tabel 20. Permasalahan, Rekomendasi, dan Tindakanlanjutan Triwulan II Tahun 2026

PERMASALAHAN		REKOMENDASI	RENCANA TINDAKLANJUT
1	Indikator Kinerja tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.	1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap indikator kinerja dengan target tahunan untuk memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan; 2. Melakukan verifikasi dan validasi secara berkala untuk memastikan agar capaian kinerja yang didapat sesuai dengan data dukung yang ada; 3. Pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.	1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pendukung Indikator Kinerja (IK) sehingga capaian akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 2. Melakukan verifikasi dan validasi capaian serta data dukung kinerja secara berkala; 3. Melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.



4.3. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI TRIWULAN I TAHUN 2026

Sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja tahun 2026, BRPI telah melakukan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Kinerja triwulan I tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel 21. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan I Tahun 2026

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status
1	Melakukan pemantauan secara berkala terhadap indikator kinerja dengan target tahunan untuk memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pendukung Indikator Kinerja (IK) sehingga capaian akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pendukung Indikator Kinerja (IK) secara berkala.
2	Melakukan verifikasi dan validasi secara berkala untuk memastikan agar capaian kinerja yang didapat sesuai dengan data dukung yang ada.	Melakukan verifikasi dan validasi capaian serta data dukung kinerja secara berkala.	Telah dilakukan verifikasi dan validasi capaian serta data dukung kinerja setiap triwulan.
3	Pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.	Melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja dilakukan secara disiplin dan tepat waktu	Telah dilakukan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja secara berkala.

Laporan Kinerja triwulan II tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban secara tertulis sekaligus menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam memberikan arahan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya. Sehingga diharapkan dapat terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).



LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agus Cahyadi**

Jabatan : Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Agus Cahyadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	86
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	92,1
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	81
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)	71,75
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	83,1
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)	71
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	77
		8	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	2
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	90

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.134.235.000
Total Anggaran Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2026		8.134.235.000

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Agus Cahyadi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agus Cahyadi**

Jabatan : Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 April 2026

PIHAK KEDUA

Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Agus Cahyadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPI (%)	86
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPI (Nilai)	92,1
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRPI (Nilai)	81
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPI (Nilai)	71,75
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRPI (Indeks)	83,1
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRPI (Nilai)	71
		7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPI (%)	77
		8	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPI (Kemitraan)	2
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRPI (Nilai)	90
		10	Indeks Pelayanan Publik BRPI (Indeks)	2,98

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7.711.854.000
Total Anggaran Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2026		7.711.854.000

Jakarta, 29 April 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Agus Cahyadi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PEMULIAAN IKAN

JALAN RAYA 2 SUKAMANDI PANTURA, PATOKBEUSI, SUBANG, JAWA BARAT 41263
TELEPON (0260) 7141000 HOTLINE : 0821 1616 8500
LAMAN www.kkp.go.id SUREL info.bppi@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.6/BRPI/KP.440/I/2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Balai Riset Pemuliaan Ikan, perlu dibentuk Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan tentang Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2026.
- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 855);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Pemuliaan Ikan.

Memberi Tugas

- Kepada : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Tim Pengelolaan Kinerja BRPI Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Surat Tugas ini.
- Untuk : Melaksanakan uraian tugas terkait kegiatan yang terlampir;

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Subang, 2 Januari 2026
Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Agus Cahyadi

Lampiran I

Nomor : B.6/BRPI/KP.440/I/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

TIM PENGELOLAAN KINERJA BALAI RISET PEMULIAAN IKAN TAHUN 2026

I. Uraian Tugas

Melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Tahun 2026 yang meliputi kegiatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan verifikasi kinerja. Masa kerja Tim Pengelolaan Kinerja BRPI terhitung sejak ditetapkannya Surat Tugas ini sampai dengan 31 Desember 2026. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Tugas ini dibebankan kepada anggaran Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2026.

II. Tim Pengelola Kinerja BRPI mempunyai Tugas :

A. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja Balai Riset Pemuliaan ikan.

B. Pelaksana

1. Ketua

Memimpin Tim Pengelola Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi di lingkungan Balai Riset Pemuliaan Ikan;

2. Anggota

Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan verifikasi kinerja di lingkungan Balai Riset Pemuliaan Ikan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan;

3. Sub-Tim Perencanaan Kinerja

a. Memastikan bahwa Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah tersusun dan memuat :

- 1) visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- 2) tujuan yang berorientasi hasil, indikator kinerja tujuan dan target;
- 3) sasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran dan target tahunan; dan
- 4) Indikator Kinerja (IK).

b. Memastikan bahwa Indikator Kinerja :

- 1) digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal;
- 2) Indikator kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan telah selaras dengan IK Pusat Riset Perikanan dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 3) Indikator kinerja memenuhi kriteria SMART; dan
- 4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

c. Memastikan bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja :

- 1) Perjanjian Kinerja (PK) :
 - (a) tersusun selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya; dan

- (b) memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan.
 - 2) Rincian Target IK secara bulanan/ triwulan/ semesteran/ tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IK; dan
 - 3) Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja.
 - d. Memastikan Rencana Aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan;
 - e. Seluruh sasaran kegiatan, indikator kinerja, target dan rencana aksi diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
 - f. Memastikan seluruh dokumen perencanaan kinerja telah tersusun.
- 4. Sub-Tim Pengukuran Kinerja**
- a. Menyusun mekanisme pengumpulan dan pengukuran data capaian kinerja BRPI;
 - b. Melaksanakan pengukuran capaian IK dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (triwulan);
 - c. Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IK dan rencana aksi diinput kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
 - d. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang oleh Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 5. Sub-Tim Pelaporan Kinerja**
- a. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (triwulan);
 - b. Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/ data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan;
 - d. Memastikan LKj yang telah disusun disampaikan tepat waktu dan di unggah ke dalam website resmi;
 - e. Menyampaikan LKj kepada Kepala Badan serta Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 6. Sub-Tim Evaluasi Kinerja**
- a. Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. Menyusun laporan nilai evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian dan peningkatan kinerja selanjutnya;
 - c. Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) di BRPI sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan.

Adapun susunan keanggotaan Tim Pengelolaan Kinerja Balai Riset Pemuliaan Ikan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agus Cahyadi, S.Pi., M.Si Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan	Penanggung Jawab
2.	Sunarso, S.Sos. Kepala Subbagian Umum	Ketua
Sub Tim Perencanaan Kinerja		
1.	Dwi Cahya Kusuma, S.Si Perencana Pertama	Anggota
Sub Tim Pengukuran Kinerja		
1.	Inna Nurbayanti Herdiana, A.Md Pengelola Layanan Operasional / Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
Sub Tim Pelaporan Kinerja		
1.	Arief Praptomo Ardhy, S.E Analisis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
2.	Ahmad Ali Akbar, S.Pi Instruktur Ahli Pertama	Anggota
3.	Deny Puji Utami, A.Md Teknisi Kesehatan Ikan Penyelia	Anggota
4.	Nur Fansuri, S.M Teknisi Akuakultur Penyelia	Anggota
5.	Inna Nurbayanti Herdiana, A.Md Pengelola Layanan Operasional / Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
6.	Maya Nurnaningsih, S.M Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
Sub Tim Evaluasi Kinerja		
1.	Inna Nurbayanti Herdiana, A.Md Pengelola Layanan Operasional / Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Agus Cahyadi